

REPRESENTASI BAHASA DALAM PERTARUNGAN SIMBOLIK DAN KEKUASAAN

Suko Winarsih

Universitas Kanjuruhan Malang, East Java

Abstract: The relation representation between power and harassment in the globalization era does not only appear concretely involving physical activities. Both operate in the representation of the symbol force to create the truth. Through representation, the reality is represented in the form of symbol system mobilisation such as language or discourse, pictures, and the like. The truth representation through symbolic universality produces social mechanism, which relates between power and harassment. The representation which should contain harmony between the tokens and something represented in some cases makes the reality vague. This is happened because the symbolic system as the medium is dominated by the certain power system.

Keywords: representasi, bahasa, pertarungan simbolik, kekuasaan

Dalam kehidupan sosial, wujud kekuasaan dalam gagasan politik formal seperti negara, dan kekerasan diidentikkan dengan aktivitas fisik yang merugikan. Perwujudan relasi kekuasaan dan kekerasan dilihat sebagai aktivitas yang melibatkan entitas-entitas fisik, baik itu tubuh para aktor, sarana-prasarana fisik, maupun institusi. Kekuasaan dan kekerasan adalah suatu interaksi yang terjadi dalam sebuah ruang konkrit dengan sumber daya yang konkrit pula.

Seiring dengan globalisasi teknologi dan informasi, wujud kekuasaan dan kekerasan mengalami perubahan secara radikal. Keduanya hadir dalam sebuah ruang yang kosong dari segala kepentingan. Kekuasaan dan kekerasan merupakan suatu entitas yang terpisah. Kekuasaan seolah-olah tidak bersinggungan dengan kekerasan dan sebaliknya. Relasi kekuasaan dan kekerasan hadir dalam sendi-sendi kehidupan dengan pola, teknik dan mekanisme yang berbeda.

SIMBOL DAN REZIM POLITIK KEBENARAN

Mekanisme kerja setiap rezim politik tidak hanya dilihat dan dianalisis dari praktik pengambilan kebijakan atau cara rezim mengatur kinerja pemerintahannya. Hal tersebut dapat pula dilihat dari pola-pola simbolik yang digunakan oleh rezim politik, baik itu wacana yang diproduksi, tutur bahasa yang digunakan, maupun proses pencitraan yang menggambarkan respon tiap rezim terhadap persoalan-persoalan politik yang terjadi.

Setiap orde politik menciptakan sistem simbol yang mencerminkan

kekhasan kekuasaannya. Orde politik di era Sukarno, misalnya, memroduksi gagasan Nasakom sebagai gugus simbolik yang bertujuan menyatukan komponen kekuatan politik yang terfragmentasi pada masa itu. Di masa Orde Baru, sistem simbolik berorientasi pada wacana pembangunan. Begitupun di era SBY-JK, wacana *good governance* dijadikan simbol utama untuk merepresentasikan visi besar pemerintahan. Rezim politik juga melukiskan dirinya dalam bahasa simbolik seperti “Penyambung Lidah Rakyat”, “Bapak Pembangunan”, atau “Anak Bangsa” (Djuarsa, 2003:28).

Pemilik simbol dapat mengejewantahkan dirinya seperti hal yang disimbolkan. Jika demikian, rezim politik dapat menjalankan praktik kekuasaannya atas nama simbol yang diciptakannya. Ia memiliki wewenang untuk menjadikan simbol itu nyata dan mendapatkan pengakuan bahwa rezim politik memiliki mandat untuk bertindak sesuai dengan karakter yang disimbolkannya.

Lebih jauh, Djuarsa (2003:30) mengatakan bahwa simbol mengandung kekuatan untuk membentuk wajah realitas. Kekuatan itu tersimpan dalam proses kategorisasi, penilaian, dan pemaksaan ide-ide tertentu kepada objek yang menafsirkan simbol. Dalam dunia politik, operasi kerja kekuatan simbol tidak terlepas dari struktur atau aktor politik yang berkepentingan mengonstruksi realitas. Wacana terorisme, misalnya digunakan oleh pemerintah untuk menentukan kelompok yang disebut teroris dan yang bukan. Terorisme sebagai wacana simbolik dijadikan modal politik bagi pemerintah dalam mengesahkan UU terorisme yang memberikan payung hukum sah untuk melakukan praktik politik, seperti membuat kategori teroris hingga ke proses penangkapan terhadap kelompok-kelompok yang dikategorikan teroris.

Hal yang sering dilupakan ialah menguak mekanisme kerja di balik kekuatan simbolik itu. Wacana terorisme sebagai wacana dominan yang mempengaruhi kebijakan semua negara saat ini erat hubungannya dengan suatu kepentingan tertentu. Wacana simbolik ini menjadi dominan karena diproduksi oleh negara Amerika Serikat yang memiliki kekuasaan ekonomi-politik melebihi negara-negara lain. Melalui kekuasaan yang dimilikinya, wacana terorisme disebar ke setiap negara sebagai program politik. Didukung oleh globalisasi ekonomi, wacana terorisme dijadikan paket wajib untuk dilaksanakan oleh semua negara, termasuk Indonesia.

Dampaknya, pemerintah Indonesia menyambut paket wajib ini dalam program politiknya karena isu terorisme bukan lagi sekadar wacana, akan tetapi mengandung implikasi ekonomi-politik bagi negara-negara yang tidak mendukung isu tersebut. Negara yang tidak sepakat dengan program anti-terorisme dapat dimarginalkan dari pergaulan ekonomi dunia. Investor asing enggan masuk, atau negara tersebut akan mendapatkan hambatan untuk peminjaman uang, atau mendapatkan tekanan politik. Dengan demikian, pemerintah - disebabkan otoritas dan legitimasi yang didapatkan dari Amerika Serikat- mempunyai kekuatan simbolik untuk mengonstruksi dan mendefinisikan realitas sesuai dengan selera dan ideologinya. Contoh lain yang berkenaan

dengan kuasa simbolik ialah wacana *good governance* yang diusung oleh pemerintahan SBY-JK sebagai visi besar pengelolaan negara., sebagaimana

dinyatakan oleh kaum orientalisme bahwa “*There is no such things as a delivered presence; there is only re-presence, or representation*” (Suparno, 1997:21). Di balik pewacanaan *good governance* tersembunyi relasi kekuasaan yang tak tampak tetapi seolah-olah objektif.

Gagasan *good governance* pertama kali dicetuskan oleh Bank Dunia pada 1989 dalam laporannya yang berjudul *Sub-Saharan Africa: From Crisis to Sustainable Growth*. Kelahiran konsep *good governance* berkaitan dengan konstruksi pembangunan bagi dunia ketiga. Sebagaimana didefinisikan oleh World Bank, *good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, investasi tanpa hambatan, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Kemunculan *good governance* sebagai wacana dominan berkaitan dengan kegagalan kapitalisme awal yang mengalami depresi ekonomi pada 1930-an dan berujung pada akumulasi kapital melambat. Penyebabnya antara lain, proteksi dari negara, paham keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, serta berbagai tradisi adat pengelolaan sumber daya alam berbasis rakyat. Untuk mengembalikan putaran kapital tanpa ada rintangan, salah satu strategi yang dijalankan oleh kapitalisme ialah mengagas konsep *good governance* (Suparno, 1997:26-31).

Dalam wacana *good governance*, demokrasi sebagai kerangka politik diperlukan demi kesuksesan pembangunan ekonomi dan ekonomi liberal menjadi mazhab utama bagi pembentukan tata ekonomi yang lebih baik. Demokrasi dan ekonomi liberal berhubungan erat secara konseptual. Artinya, upaya mendorong demokrasi secara bersamaan mendorong pula ekonomi pasar bebas. Bank Dunia menyatakan bahwa *good governance* berarti pemerintah yang kompeten dan memiliki akuntabilitas yang “didedikasikan pada kebijakan-kebijakan ekonomi liberal” (Ankersmit, 1987:88).

Sebenarnya, politik wacana *good governance* telah mengaburkan relasi kuasa dan dominasi melalui justifikasi lembaga, aktor politik, dan teori-teorinya. Hubungan yang menindas dan memaksa dari kapitalisme ditutupi sedemikian rupa oleh wacana *good governance* dengan meminggirkan peran negara, sedangkan ruang bagi pasar dan lembaga-lembaga swasta semakin diperluas. Wacana *good governance* menyembunyikan kuasa ideologi tertentu untuk menciptakan tata ekonomi-politik baru.

Muncul pertanyaan, mengapa wacana *good governance* diterima begitu saja oleh masyarakat sebagai konsep yang sah untuk tata pemerintahan dan dianggap mujarab bagi penyembuhan birokrasi negara? Dengan menggunakan argumen Pierre Bourdieu, “*What creates the power of words and slogan, a power capable of maintaining or subverting the social order, is the belief in the legitimacy of words and of those who utter them*” (Bourdieu, 1984:70). Sebuah konsep, bahasa, atau wacana dianggap sah bergantung kepada siapa yang mengucapkannya (memproduksi). Dalam ranah politik, jika seseorang atau lembaga mendapatkan otoritas dan legitimasi untuk mengucapkan sesuatu, memproduksi wacana, maka ucapan atau wacana tersebut dianggap sebagai kebenaran.

Ketika Bank Dunia, seorang Presiden atau aparatus negara yang mendapatkan otoritas untuk menyosialisasikan gagasan dan praktik *good governance*, maka masyarakat memandangnya sebagai sesuatu yang sah. Otoritas melekat pada kekuasaan untuk memproduksi wacana tertentu. Dari argumen tersebut, *good governance* menjadi kekuatan efektif menata cara berpikir dan bertindak masyarakat. Tidak perlu lagi membongkar konsep *good governance* atau menguak kepentingan di balik konsep itu. *Good governance* – melalui kekuasaan simbolik yang bekerja - dianggap dapat menyembuhkan kondisi bangsa yang sedang sakit (Suparno, 1997:31).

DARI MACRO-POWER KE MICRO-POWER

Dalam diskursus ilmu politik, studi mengenai kekuasaan (*power*) menempati posisi sentral. Karenanya, tidak heran apabila sebagian orang menyatakan bahwa hubungan antara politik dan kekuasaan ibarat dua sisi mata uang. Kekuasaan (*power*), menurut Bourdieu (1986:84) merupakan sebuah konsepsi yang memiliki arti beragam. Sebenarnya, kajian terhadap kekuasaan sudah berlangsung sejak zaman Yunani. Meskipun sudut pandang yang digunakan untuk membedah kekuasaan beraneka ragam, tetapi prinsip umumnya adalah bahwa setiap kekuasaan cenderung untuk dipertahankan, dilestarikan, dan diproduksi kembali oleh aktor atau institusi yang memiliki kekuasaan itu.

Strategi mempertahankan dan melestarikan sebuah kekuasaan mengandaikan penggunaan kekerasan. Pertautan keduanya – kekuasaan dan kekerasan- terwujud dalam bentuk yang plural. Ada yang mengabsahkan pemakaian segala cara meskipun buruk yang penting kekuasaan tetap terjaga. Pemikiran seperti ini dapat ditemukan pada pemikiran politik Niccolo Machiavelli dalam karyanya *The Prince*. Bagi Machiavelli, kekuasaan harus dilestarikan melalui cara apapun agar kedaulatan sang penguasa (negara) tetap tegak. Karenanya penggunaan kekerasan yang bersifat fisik pun dapat dibenarkan, seperti intimidasi, penyiksaan, penculikan, dan sebagainya. Dengan kata lain, negara memiliki kewenangan melakukan politik kekerasan untuk mempertahankan dominasinya terhadap yang dikuasainya.

Akan tetapi, praktik dominasi kekuasaan tidak semata-mata diadakan melalui kekerasan fisik. Antonio Gramsci – seorang pemikir neo marxis dari Italia- menyatakan bahwa kekuasaan dapat dilanggengkan melalui strategi hegemoni. Hegemoni yang dimaksudkan oleh Gramsci (1971: 46) ialah peran kepemimpinan intelektual dan moral (*intellectual and moral leadership*) untuk menciptakan ide-ide dominan.

Berangkat dari kritiknya terhadap konsepsi kekuasaan ala Karl Marx yang mereduksi praktik dominasi pada struktur ekonomi, Gramsci lebih jauh berpandangan bahwa kekuasaan diperoleh lewat hegemoni ide-ide (dalam wilayah budaya) yang didasarkan atas mekanisme konsensus. Melalui hegemoni, ide-ide yang diciptakan penguasa menentukan struktur kognitif masyarakat. Upaya hegemoni ini berlangsung untuk menggiring persepsi orang dalam kerangka yang telah ditentukan oleh negara. Misalnya, pada masa Orde Lama, Sukarno menciptakan hegemoni ide dalam wujud musuh bersama (*common enemy*) yaitu neo kolonialisme dan imperialisme. Di era Soeharto, anti

PKI merupakan ide besar. Ide-ide dominan tersebut mampu menghasilkan konsensus bersama serta menciptakan rasa persatuan masyarakat bahwa musuh besar bangsa adalah Nekolim dan PKI (Djuarsa, 2003:38). Dengan begitu, hegemoni cenderung mengalihkan perhatian masyarakat dari realitas yang sesungguhnya. Tujuannya tak lain adalah mempertahankan kekuasaan penguasa negara.

Untuk menjaga keberlangsungan proses reproduksi kekuasaan dan relasi kekuasaan, Louis Althusser – salah seorang pemikir neo marxis lainnya - meletakkan negara sebagai institusi sentral yang berperan mempersatukan dan memaksa masyarakat dalam reproduksi kekuasaan. Hal ini dimulai dengan merevisi teori marxis tentang *state power*. Althusser membedakan antara kuasa negara (pemeliharaan kekuasaan negara atau perebutan kuasa negara) sebagai tujuan perjuangan kelas politik dan aparatus negara di sisi lain (Gramsci, 1971:29).

Dalam pandangan Althusser, kuasa negara masih dapat berubah dan berganti akibat dari perebutan kekuasaan oleh kelas-kelas politik yang ada. Sedangkan aparatus negara relatif dapat bertahan meski terjadi peralihan kekuasaan. Bercermin pada momen politik reformasi 1998 di Indonesia, dapat dipelajari bahwa meskipun telah terjadi peralihan kekuasaan yang ditandai dengan turunnya Soeharto melalui kekuatan-kekuatan politik yang ada pada saat itu, namun aparatus negara (politisi, partai politik, atau militer Orde Baru) tetap langgeng di struktur kekuasaan (Djuarsa, 2003:19).

Althusser lebih lanjut memaparkan perbedaan aparatus negara dalam kaitannya dengan reproduksi kekuasaan. *Pertama*, Aparatus Negara Represif (*Repressive State Apparatus, RSA*) yang bekerja dengan cara represif melalui kekerasan fisik maupun nonfisik, seperti pemerintah, militer, polisi, lembaga peradilan. *Kedua*, Aparatus Negara Ideologis (*Ideological State Apparatus, ISA*). Mempunyai modus kerja yang berlangsung melalui cara-cara yang ideologis-persuasif, seperti lembaga agama, pendidikan, media massa, partai politik, dan sebagainya. Pada bentuk kedua inilah, negara memperkuat kekuasaannya melalui muatan-muatan ideologi yang tak tampak (Laeyendecker, 1983:59).

Perjuangan dominasi kekuasaan, dalam piranti aparatus negara ideologis, mengandalkan model ideologi tertentu untuk menciptakan subjek. Pembentukan subjek ini dapat ditemukan ketika aparatus negara ideologis menyapa, merayu, dan mengajak subjek untuk menjadi pengikut. Slogan “Bersama Kita Bisa”, misalnya, berperan secara simpatik untuk mengajak masyarakat bergabung dalam kebersamaan ideologis di bawah pemerintahan SBY-JK. Dalam perspektif Althusser maupun Gramsci, slogan tersebut berupaya menanamkan citra yang bersahabat bahwa pemerintah dekat dengan rakyat atau persoalan bangsa hanya dapat diatasi bila pemerintah dan masyarakat bersatu padu.

Berangkat dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pertautan kekuasaan dan kekerasan semakin kompleks. Kondisi ini didukung oleh fakta sosial yang mengalami perubahan terus-menerus akibat globalisasi ekonomi pasar dan teknologi informasi yang terjadi di abad 21 ini. Arus globalisasi tidak hanya menandai kaburnya batas-batas negara, melainkan juga praktik kekuasaan dan kekerasan. Jika sebelumnya negara menjadi gugus institusi

sentral dalam penggunaan kekuasaan dan kekerasan untuk mengendalikan masyarakat, maka dalam konteks masyarakat global saat ini negara tidak lagi menempati posisi sentral.

Salah satu fenomena menarik pada era globalisasi dewasa ini ialah munculnya pusat-pusat kekuasaan dan kekerasan di samping negara, seperti lembaga pengetahuan yang berfungsi sebagai tank-tank perubahan, institusi-institusi bisnis, organisasi masyarakat sipil, dan sebagainya. Perubahan ini memperlihatkan pola-pola baru penggunaan kekuasaan dan kekerasan selaras dengan semakin majemuknya kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Strategi, taktik, dan teknik yang digunakan pun semakin canggih, sehingga pola kekuasaan dibuat seolah-olah terlepas dari kekerasan, atau sebaliknya.

Dengan demikian, relasi kekuasaan dan kekerasan menjadi tidak jelas. Kekerasan yang ada tertutupi oleh kekuasaan yang bekerja secara halus melalui representasi simbol-simbol. Pola baru yang menandai relasi kekuasaan dan kekerasan melalui sistem representasi simbol mengharuskan adanya pergeseran pemahaman mengenai keduanya, baik kekuasaan maupun kekerasan.

Konfigurasi baru kekuasaan dan kekerasan yang telah bermetamorfosis tersebut tidak lagi terobsesi pada narasi-narasi besar, melainkan menjelma dalam praktik simbolik yang dekat dengan kita. Peralihan pola tersebut selaras dengan kecenderungan “pembalikan ke arah bahasa” (*linguistic turn*) (Fashri, 2008). Salah satu tokoh yang memberikan perspektif baru mengenai pertautan kekuasaan dan kekerasan ini ialah Pierre Bourdieu. Pemikiran Bourdieu menguak modus operandi kekuasaan di dalam praktik simbolik bahasa/wacana, sehingga melahirkan kekerasan simbolik sebagai sebuah mekanisme sosial untuk mereproduksi kekuasaan.

PERTARUNGAN SIMBOLIK: ARENA PEREBUTAN MAKNA

Dalam relasi komunikasi terdapat hubungan antara pengirim pesan atau pembicara (*sender*) dan penerima pesan atau pendengar (*receiver*), yang didasarkan atas penulisan dan pembacaan pesan/kode yang memperlihatkan hubungan kekuasaan simbolik antara produsen yang memiliki modal linguistik dan konsumen yang memperoleh keuntungan material atau simbolik tertentu. Namun, menurut Bourdieu (Fashri, 2008) pesan/kode (berupa wacana) bukan hanya diterima sebagai kumpulan tanda yang harus dipahami.

Wacana sebagai kumpulan tanda merupakan tanda kesejahteraan (*signs of wealth*) yang perlu dinilai dan diapresiasi menunjukkan dirinya sebagai tanda otoritas (*signs of authority*) yang harus diyakini dan dipatuhi. Dari argumen tersebut, Bourdieu (1984:72) memperlihatkan bahwa bahasa/wacana merupakan bagian dari aktivitas di mana sebagian orang mendominasi yang lain. Seperti halnya pelaku sosial yang memiliki modal finansial yang besar mampu mengontrol mereka yang tidak memiliki, begitupun pelaku sosial yang mampu mengakumulasi modal linguistiknya maka ia mempunyai kendali atas mereka yang terbatas modal linguistiknya. Oleh karena itu, bahasa/wacana berperan penting untuk mendefinisikan suatu kelompok, memberi otoritas bagi pelaku sosial serta menghadirkan kekuasaan untuk berbicara atas nama kelompok itu.

Dengan kata lain, otoritas untuk dipercayai dan dipatuhi menjadi tujuan dari setiap pelaku sosial dalam kaitannya dengan kekuasaan simbolik. Di dalam setiap ranah selalu terdapat pertarungan antara yang mendominasi dan yang didominasi. Prinsip tersebut juga berlaku dalam ranah bahasa, di mana ada pertarungan antara wacana dominan (*doxa*) yang berkepentingan melestarikan dominasinya dan wacana pinggiran yang terus berupaya menggugat wacana dominan.

Doxa ialah dunia wacana yang mendominasi kita. Ia merupakan semesta makna yang diterima begitu saja kebenarannya tanpa dipertanyakan lagi. Dekat dengan pengertian ideologi, *doxa* dapat dimengerti sebagai sejenis tatanan sosial dalam diri individu yang stabil dan terikat pada tradisi serta terdapat kekuasaan yang sepenuhnya ternaturalisasi dan tidak dipertanyakan. Ia kemudian menjadi kesadaran kolektif yang dianggap hadir begitu saja tanpa dipertimbangkan lagi. *Doxa* bisa berupa kebiasaan sederhana seperti cara berbicara, cara makan, dan persoalan kepercayaan.

Ketika wacana dominan mendominasi pasar, ia memiliki kemampuan untuk mendefinisikan “yang lain” (*the other*). Kapasitas ini dimiliki karena otoritas untuk menjadikan “*the other*” patuh dan percaya. Berdasarkan konsepsi ranah Bourdieu, ranah pertarungan wacana bersifat dinamis, yaitu ranah yang berupaya mempertahankan pandangan sahnya, dan ranah yang berupaya menggugat. Kedinamisan ranah pertarungan berhubungan pula dengan posisi pelaku sosial untuk memperebutkan posisi-posisi yang strategis.

Dalam kaitannya dengan *doxa*, mereka yang tidak memiliki jumlah modal yang besar cenderung menggugat kemapanan *doxa*. Wacana yang menentang *doxa* dinamakan *heterodoxa*. Wacana ini mengambil strategi subversi, di mana kelompok yang minim modal terus mempersoalkan otoritas wacana kelompok dominan dalam mendefinisikan dunia sosial. Sementara *orthodoxa* merupakan wacana yang bertujuan mempertahankan *doxa*. Mereka yang berada di balik wacana *orthodoxa* ialah kelompok penguasa atau mereka yang mendukung status quo serta kalangan yang menikmati senioritas mereka. Strategi yang dipakai ialah strategi defensif dan strategi pelestarian (*conversation*), di mana wacana kritis dibungkam agar tidak mengganggu “kenyamanan” kelompok dominan (Bourdieu, 1984:79-84).

Wujud Pertarungan antara *Heterodoxa* dan *Orthodoxa*

Berikut ini adalah contoh pertarungan wacana antara *heterodoxa* dan *orthodoxa* yang terjadi pada masa Orde Baru. Ketika itu rezim Orde Baru gencar mempromosikan Pancasila sebagai motor penggerak bangsa. Penyelenggaraan pemerintah harus berlandaskan pada kemurnian ideologi Pancasila. Untuk membangun kekuatan wacana kemurnian Pancasila, rezim Orde Baru mengoptimalkan segenap modal yang dimilikinya, yaitu modal ekonomi, modal budaya, dan modal simbolik.

Melalui penguasaan modal yang besar, rezim Orde Baru mampu menjadikan wacana kemurnian Pancasila sebagai wacana dominan. Namun wacana dominan tadi dibangun melalui pembungkaman terhadap wacana-wacana lain terutama komunisme. Kemurnian Pancasila ditafsirkan berdasarkan kepentingan rezim Orde Baru melalui produksi argumen-argumen

ilmiah. Tujuannya ialah agar wacana dominan itu dianggap benar, dipercaya, dan sah.

Demokrasi terpimpin yang semula diartikan sebagai demokrasi yang dipimpin oleh semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, ternyata dalam pelaksanaannya menjurus kepada arah pemujaan dan pengagungan seseorang, sehingga membiarkan segala kekuasaan dengan melawan konsitusi berpusat di tangan seorang "Pemimpin Besar". Keadaan itu dimanfaatkan dan disalahgunakan oleh PKI waktu itu untuk menyusun kekuatan dan mengelabui rakyat yang akhirnya berpuncak pada pemberontakan G-30-S/PKI. Masyarakat Indonesia sadar bahwa penyelewengan falsafah dan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 hanya akan membawa bangsa Indonesia ke jurang kehancuran. Dan sebagai masyarakat Indonesia, kita bertekad untuk kembali ke pangkal cita-cita perjuangan bangsa kita, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tekad itulah yang menjiwai kelahiran dan perjuangan Orde Baru (Laeyendecker, 1983:62). Teks tersebut memberikan gambaran bahwa wacana kemurnian Pancasila dibangun melalui mekanisme oposisi biner, di mana sistem kategorisasi dibentuk berdasarkan kategori-kategori yang saling berhadapan dan bertentangan, misalnya, Pancasila >< anti Pancasila; rezim demokratis >< rezim otoriter; penjaga keutuhan ideologi >< penyelewengan ideologi; kemurnian Pancasila >< komunisme. Lewat mekanisme oposisi biner, rezim Orde Baru mengidentifikasi dirinya sebagai kategori yang benar, baik, dan murni. Sementara mereka yang berada di luar Orde Baru dimasukkan sebagai kelompok yang salah, sesat, dan tidak murni.

Wacana kemurnian Pancasila yang dikeluarkan oleh Orde Baru menjadi wacana dominan (*orthodoxa*) dan selama puluhan tahun mampu mengalahkan wacana-wacana lain yang coba menggugatinya (*heterodoxa*). Wacana dominan Orde Baru mampu menyeragamkan cara berpikir hingga cara bertindak kita. Sementara kelompok yang menawarkan wacana tandingan harus sembunyi-sembunyi menyebarkan opini mereka. Ketika reformasi meledak barulah kelompok-kelompok ini berani menyuarakan wacana alternatif guna menggugat hegemoni wacana Orde Baru dan melakukan tafsiran kembali terhadap sejarah masa lalu yang ditafsirkan oleh rezim Orde Baru secara sewenang-wenang. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam ranah pertarungan wacana selalu ada upaya mengakumulasi modal simbolik demi memperoleh kekuasaan simbolik. Dengan kata lain, berlangsungnya pertarungan simbolik bertujuan untuk memperebutkan kekuasaan makna yang sah (Laeyendecker, 1983:64).

Siasat Halus Mendominasi "Yang Lain"

Dalam pertarungan simbolik, selalu terdapat kekuatan-kekuatan untuk memberi nama yang diakui secara resmi, memonopoli visi yang sah terhadap dunia sosial, dan memaksa pandangan suatu kelompok atas kelompok lain. Dalam pertarungan simbolik pula, kompetisi antarpelaku sosial terjadi dengan tujuan akhir memperoleh kekuasaan. Kekuasaan yang dituju berupa kekuasaan untuk mengontrol persepsi, pandangan, visi, juga cara pandang seseorang maupun kelompok sosial. Perbedaan dalam mempersepsi dan mengapresiasi

dunia sosial menjadi tonggak awal bagi berlangsungnya pertarungan simbolik (Ankersmit: 1987:69).

Ajang perebutan memperoleh kekuasaan haruslah dimaknai sebagai upaya memproduksi dan menampilkan pandangan dunia yang paling diakui, yang paling benar, dan yang paling sah. Kesemuanya ini bermuara pada kepentingan memperoleh legitimasi atau pengakuan bahwa hanya pandangan merekalah yang paling absah bila dibandingkan yang lain (Ankersmit: 1987:72). Kekuasaan pembentuk dunia melalui pandangan yang paling sah inilah yang disebut dengan kekuasaan simbolik (*symbolic power*).

Kekuasaan simbolik – dalam pengertian Bourdieu - merupakan suatu kekuasaan untuk mengonstruksi realitas melalui tatanan *genoseological*, yaitu pemaknaan yang paling dekat mengenai dunia sosial suatu kelompok atau orang (Bourdieu, 1984: 166). Kekuasaan simbolik ialah kekuasaan yang tidak tampak dan hanya dikenali dari tujuannya untuk memperoleh pengakuan. Sebuah kekuasaan simbolik, meskipun tidak dikenali bentuk aslinya tetapi ia tetap diakui. Kekuasaan simbolik bekerja dengan menggunakan simbol-simbol sebagai instrumen “pemaksa” terhadap kelompok subordinat yang turut berperan mereproduksi tatanan sosial sesuai dengan keinginan kelompok dominan, sebagaimana yang dipaparkan oleh Bourdieu (1984:169): “*What creates the power of words and slogans, a power capable of maintaining or subverting the social order, is the belief in the legitimacy of words and of those who utter them.*”

Menurut Bourdieu (1986:137-138) kekuasaan simvoli dalam mengoptimalkan kekuatannya tergantung pada dua hal. *Pertama*, seperti halnya wacana performatif, kekuasaan simbolik didasarkan pada kepemilikan modal simbolik (*symbolic capital*). Semakin besar seseorang atau suatu kelompok memiliki modal simbolik, semakin besar peluangnya untuk menang. Artinya, modal simbolik merupakan kredit bagi terbentuknya otoritas sosial yang diperoleh dari pertarungan sebelumnya. *Kedua*, kekuasaan simbolik bergantung kepada efektivitas simbolik, di mana strategi investasi simbolik bekerja. Efektivitas ini bekerja atas dasar pandangan yang ditawarkan atau sejauh mana strategi investasi simbolik dijalankan. Dalam pandangan ini, kekuasaan simbolik merupakan sebuah kekuasaan pentasbihan, sebuah kekuasaan untuk menyembunyikan atau menampakkan sesuatu lewat kata-kata.

Dalam menyembunyikan dominasinya, kekuasaan simbolik menjalankan bentuk-bentuk yang halus agar tak dikenali. Begitu halusnya praktik dominasi yang terjadi menyebabkan mereka yang didominasi tidak sadar, bahkan mereka menyerahkan dirinya untuk masuk ke dalam lingkaran dominasi. Dominasi yang mengambil bentuk halus inilah yang disebut oleh Bourdieu sebagai kekerasan simbolik (*symbolic violence*), yaitu sebuah kekerasan yang lembut (*a gentle violence*), sebuah kekerasan yang tak kasat mata (*imperceptible and visible*) (Bourdieu, 1980:1). Secara lebih lengkap, kekerasan simbolik merupakan suatu bentuk kekerasan yang halus dan tak tampak yang di baliknya menyembunyikan praktik dominasi.

Kekerasan simbolik menciptakan mekanisme sosial yang bersifat objektif, di mana mereka yang dikuasai menerimanya begitu saja. Mekanisme

objektif yang diciptakan oleh kekerasan simbolik memanfaatkan simbol-simbol yang ada untuk memenuhi fungsi politiknya, yaitu kehendak untuk berkuasa. Seperti halnya sistem kekuasaan, mereka yang mendominasi menyebarkan pengaruh-pengaruh ideologis atau memaksakan pandangan kelompok mereka atas kelompok marginal. Kekerasan simbolik merupakan 'kekuatan magis' yang mampu menundukkan pihak yang lemah melalui mantra-mantra yang diciptakannya. Mereka yang didominasi tak sadar kalau mereka sedang digiring untuk menerima atau mengadaptasi pandangan, nilai-nilai, dan kriteria kelas yang berkuasa.

Kekerasan simbolik bukan saja bentuk dominasi yang diterapkan melalui media komunikasi atau bahasa, tapi ia merupakan penerapan dominasi sedemikian rupa sehingga praktik dominasi itu diakui secara salah dan meskipun demikian ia diakui sebagai sesuatu yang sah (Bourdieu, 1980:183-184). Karena itu, kekerasan simbolik yang mengambil bentuk yang sangat halus ini tidak mengundang resistensi karena ia sudah mendapatkan legitimasi sosial.

Bagaimana kekerasan simbolik dijalankan? Mekanisme beroperasinya kekerasan simbolik melalui dua cara. *Pertama*, melalui cara eufemisasi (*euphemization*,) yaitu menjadikan kekerasan simbolik tidak kelihatan, berlangsung secara lembut, serta mendorong orang untuk menerima apa adanya. Biasanya cara ini berlangsung dengan melembutkan ekspresi, wacana atau bahasa ke dalam bentuk-bentuk filosofis yang bersifat abstrak. *Kedua* melalui mekanisme sensorisasi (*censorship*). Mekanisme ini beroperasi tidak hanya di dalam produksi wacana oral sehari-hari, tetapi juga berhubungan dengan produksi wacana ilmiah yang dibangun dalam teks tertulis (Bourdieu, 1980:186). Tujuannya ialah untuk menentukan hal yang boleh dikatakan dan hal yang tidak boleh dikatakan dalam rangka pelestarian "nilai-nilai utama", sebagaimana dikatakan oleh Bourdieu (1980:187), "*The need for this /censorship to manifest itself in the form of explicit prohibitions, imposed and sanctioned by an institutionalized authority*". Mekanisme kekerasan simbolik bekerja secara efektif ketika yang didominasi merasakan ketidaktahuan sekaligus mengakuinya. Karena itu, menurut Bourdieu, kekerasan simbolik beroperasi lewat prinsip simbolik yang diketahui dan dikenali oleh kedua belah pihak, yaitu yang mendominasi dan yang didominasi, entah itu bahasa, gaya hidup, cara berpikir, cara berbicara, bahkan cara bertindak sekalipun (Bourdieu, 1986:2).

Bagaimana pun, kekerasan simbolik selalu mengandalkan bahasa sebagai alat efektif untuk melakukan "dominasi terselubung", karena bahasa sebagai sistem simbolik yang tidak saja digunakan sebagai alat komunikasi, tetapi juga berperan sebagai instrumen kekuasaan dengan memanfaatkan mekanisme kekerasan simbolik. Bourdieu mengajarkan kepada kita untuk selalu curiga terhadap bahasa, konsep, wacana, tanda, slogan, ataupun simbol lainnya yang diproduksi oleh kelas dominan. Melalui kekuasaan simbol pula lah dunia ini ditafsirkan, dan didefinisikan untuk kelas subdominan kepada pengakuan serta penerimaan terhadap pandangan dunia mereka yang bermodal besar.

PIERRE BOURDIEU: BAHASA DAN KEKUASAAN SIMBOLIK

Bahasa adalah sebuah produk budaya. Oleh karena itu, bahasa tidak dapat dilepaskan dari konteks sosialnya. Bourdieu mengkritik adanya bahasa formal atau bahasa murni. Ia keberatan, misalnya, dengan pemisahan antara *langue* dan *parole* yang dilakukan oleh Saussure. Bahasa formal itu menurutnya tidak pernah ada. Ia selalu merupakan proses sosial yang kompleks, yang terkait dengan sejarah dan proses sosial setempat (Fashri, 2008).

Pertukaran linguistik sebagai sebuah relasi komunikasi antara pengirim dan penerima pesan. Ia adalah sebuah konteks sosial. Ia adalah sebuah pertukaran ekonomi. Di dalamnya berlaku juga logika ekonomi seperti produsen dan konsumen, modal linguistik, dan pasar, di mana orang dapat memperoleh keuntungan baik material maupun simbolik. Dengan kata lain, ujaran tidak hanya untuk dimengerti, melainkan juga adalah sebuah tanda kekayaan (*sign of wealth*) dan tanda kekuasaan (*sign of authority*), yang dapat memaksakan sebuah dominasi (Fiske, 1996: 8). Dalam kenyataannya sehari-hari, bahasa jarang digunakan hanya sebagai sebuah alat komunikasi. Di dalam usaha komunikasi tersebut bahkan sering terjadi pertentangan kepentingan antara penyampaian informasi dan keinginan untuk mendapatkan keuntungan simbolik.

Ujaran mendapatkan nilai dari hubungannya dengan pasar, yang ditentukan oleh relasi agen-agen di dalamnya. Nilai tersebut tergantung pada relasi kekuasaan yang ditentukan oleh kompetensi linguistik para pembicara, yang tergantung pada kapasitas agen di dalamnya untuk memaksakan suatu kriteria penerimaan yang paling menguntungkan bagi produk mereka. Kapasitas ini bukan semata-mata kapasitas linguistik, melainkan ditentukan juga oleh keseluruhan struktur sosial, yang berarti juga kedudukan sosial pengujar, tempat ujaran itu berlaku.

Hal ini jelas terlihat di dalam praktik penggunaan bahasa formal dalam acara-acara pertemuan aparat negara misalnya. Bahasa formal melakukan pemaksaan kepada pendengarnya, aparat rendah misalnya, yang belum tentu mengerti bahasa formal tinggi yang penuh dengan jargon dan istilah asing. Bahasa formal ini memiliki kekuatan memaksa karena berkenaan dengan struktur yang berlaku, dan oleh karena itu bahasa formal memiliki legitimasi.

ANTISIPASI KEUNTUNGAN

Sebuah wacana dapat diterima oleh masyarakat bukan hanya selama wacana tersebut secara gramatikal benar, melainkan juga terutama karena wacana tersebut dapat diterima secara sosial. Dan dengan demikian, wacana tersebut efektif sebagai sebuah relasi produksi dan sirkulasi, yang di dalamnya tunduk pada hukum formasi harga yang menentukan karakteristik pasar. Dalam kenyataannya, kondisi penerimaan dapat dilihat sebagai kondisi produksi dan antisipasi penerimaan di pasar. Antipasi ini akan menentukan produksi dari wacana. Antisipasi keuntungan ini tidaklah terjadi sebagai sebuah usaha kalkulasi secara sadar. Ia diarahkan oleh keinginan untuk diterima dalam lingkungan sosialnya.

Karena tanda-tanda linguistik adalah komoditas yang akan diberikan harga oleh kekuasaan sesuai dengan hukum pasar di mana mereka

diwacanakan, dengan demikian produksi linguistik terpengaruh oleh antisipasi penerimaan pasar. Semua ekspresi verbal, baik antarteman, dalam birokrasi dan lingkungan akademik, ditandai oleh kondisi penerimaan yang berpengaruh sampai level gramatikal. Para pemakai berusaha memaksimalkan keuntungan simbolik di dalam pertukaran komoditas tersebut.

Batasan-batasan yang ditentukan oleh relasi di dalam pasar ini terlihat misalnya dalam bentuk swasensor oleh produsen, supaya ujarannya dapat diterima di pasar tertentu. Ia juga terlihat pada *switching* dalam sebuah situasi percakapan bilingual, atau naik turunnya 'level bahasa.' Contoh bahwa antisipasi keuntungan seperti ini berlaku ditunjukkan oleh Bourdieu (1986:11) bahwa di dalam lingkungan akademis, kata-kata menjadi komoditas sekaligus mata uang. Di dalamnya terjadi perjuangan bagi individu untuk masuk ke dalam hierarki yang sah. Kata-kata diklasifikasikan secara intelektual, sebagai tanda penerimaan di dalam pasar.

Bourdieu (1986:15) melihat bahwa klasifikasi sosial ini diterjemahkan secara sistematis menjadi penilaian akademis. Dengan demikian, terjadi pemaksaan legitimasi oleh mereka yang memiliki modal simbolik yang besar. Hal ini merupakan sebuah reproduksi sosial terselubung, penghargaan atas prestasi, yang sebenarnya hanyalah perwujudan relasi kekuasaan. Strategi untuk menaikkan nilai pasar ini dapat dilakukan dengan hal yang dinamakan oleh Bourdieu sebagai 'gaya promosi'. Melalui gaya promosi suatu wacana ditampilkan supaya dapat diterima di dalam pasar simbolik. Berhasil tidaknya gaya promosi menentukan diterima atau tidaknya wacana akademik tersebut.

HABITUS LINGUISTIK

Habitus linguistik adalah sebuah kecenderungan budaya untuk mengatakan hal-hal tertentu, sebagai suatu kompetensi linguistik yang spesifik untuk mengatakan sesuatu 'secara benar' dan kapasitas sosial untuk menggunakan kompetensi itu secara tepat (Bagus, 1996:85). Habitus ini ditanamkan sejak kecil dengan teguran dan larangan jika kita berkata-kata dengan tidak tepat di dalam situasi tertentu, misalnya di rumah atau di sekolah.

Kemampuan untuk berbahasa sesuai kondisi dan kapasitas inilah yang kemudian menjadi kompetensi. Kompetensi ini dibutuhkan di dalam konteks sosial dan pada praktiknya tidak dapat dipisahkan dari penguasaan sebuah bahasa dan juga penguasaan penggunaan bahasa di dalam situasi yang tepat yang dapat diterima secara sosial. Dengan kata lain, berbahasa harus disesuaikan dengan kelas sosial seseorang.

Hubungan yang terjadi di dalam struktur sosial adalah sebuah ketidaksetaraan Meskipun semua orang pada dasarnya adalah produsen dan konsumen ujaran, namun mereka tidak memiliki kekuasaan yang sama. Orang-orang yang berada pada kelas menengah bawah (*petits bourgeois*) selalu mengalami ketegangan di dalam pasar ujaran ini. Mereka selalu ingin menampilkan diri dengan baik dan berusaha berbicara di atas kelas sosial mereka. Mereka merasa tidak nyaman dan cemas dengan posisi mereka. Ketegangan dan kecemasan ini terlihat dari usaha mereka untuk melakukan produksi maupun konsumsi simbolik. Mereka juga mau melakukan investasi

untuk menaikkan kompetensi yang *legitimate* (Bourdieu, 1986:19).

KESIMPULAN

Bahasa mempunyai daya atau kekuatan dalam merepresentasikan pertarungan simbolik dan kekuasaan di dunia politik. Setiap orde politik menciptakan sistem simbol yang mencerminkan kekhasan kekuasaannya. Rezim politik dapat menjalankan praktik kekuasaannya atas nama simbol yang diciptakannya. Praktik dominasi kekuasaan dapat dilanggengkan melalui strategi hegemoni, yaitu peran kepemimpinan intelektual dan moral (*intellectual and moral leadership*) untuk menciptakan ide-ide dominan. Wacana yang mendominasi disebut *doxa*. Wacana yang menentang *doxa* dinamakan *heterodoxa*, yang mempersoalkan otoritas wacana kelompok dominan dalam mendefinisikan dunia sosial. Sementara *orthodoxa* merupakan wacana yang bertujuan mempertahankan *doxa*. Mereka yang berada di balik wacana *orthodoxa* ialah kelompok penguasa atau mereka yang mendukung status quo serta kalangan yang menikmati senioritas mereka.

Bahasa adalah sebuah produk budaya yang sekaligus berarti produk sosial suatu masyarakat. Sebuah kecenderungan budaya untuk mengatakan hal-hal tertentu, sebagai suatu kompetensi linguistik yang spesifik untuk mengatakan sesuatu 'secara benar' dan kapasitas sosial untuk menggunakan kompetensi itu secara tepat disebut habitus linguistik. Habitus linguistik merupakan kebiasaan berbahasa seseorang berdasarkan situasi atau konteks sosial, atau dengan kata lain berhubungan dengan cara, sikap, dan kesantunan berbahasa yang ditanamkan sejak kecil di dalam situasi tertentu, misalnya di rumah atau di sekolah.

REFERENSI

- Ankersmit, F.R. 1987. *Refleksi Tentang Sejarah: Pendapat-pendapat Modern tentang Filsafat Sejarah*. Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama
- Bagus, Lorens. 1996. *Kamus Filsafat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Bourdieu, Pierre. 1980. *The Logic of Practice*. Stanford: Stanford University Press
- Bourdieu, Pierre. 1984. *Distinction: A Social Critique of the Jugdement of Taste*. London: Routledxge
- Bourdieu, Pierre. 1986. "The Form of Capital" di dalam *Handbook of Theory and Research for Sociology of Capital*. J.G. Richardson. New York: Greenwood Press
- Djuarsa, S., Sasa. 2003. *Teori Komunikasi*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Fashri, Fauzi. 2008. [Pierre Bourdieu: Bahasa dan Kekuasaan Simbolik](http://onisur.wordpress.com/wp-admin/CTRL) *http://onisur.wordpress.com/wp-admin/CTRL*. Akses, 30 Januari 2009.
- Fiske, John. 1996. *Introduction to Communication Studies*. Sage Publications
- Gramsci, Antonio. 1971. *Selection from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci*. New York: International Publisher
- Laeyendecker, L. 1983. *Tata, Perubahan dan Ketimpangan: Suatu Pengantar Sejarah Sosiologi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Suparno, Paul. 1997. *Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.